



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA  
KAJIAN KESIAPAN KOTA BANJARMASIN UNTUK MENJADI PENYANGGA  
IBU KOTA NEGARA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah pertumbuhan ekonomi;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Kelompok Kerja Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 136 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM KELOMPOK KERJA  
 KAJIAN KESIAPAN KOTA BANJARMASIN  
 UNTUK MENJADI PENYANGGA  
 IBU KOTA NEGARA

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA  
 KAJIAN KESIAPAN KOTA BANJARMASIN UNTUK MENJADI PENYANGGA  
 IBU KOTA NEGARA

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Pelaksana					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara	Rp500.000,00	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara	Rp500.000,00	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Kesiapan Kota Banjarmasin untuk Menjadi Penyangga Ibu Kota Negara	-	-
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan;	-	-
7.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan	-	-
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Pertanahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Kepala Bidang Pariwisata / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
12.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Kepala Bidang Lalu Lintas / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
14.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
15.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Harwita Oktania, ST, MT / Teknik Penyehatan Lingkungan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
17.	Ahmad Maulani, ST / Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
18.	Maulana Luthpi, SST / Pekerja Sosial / Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
19.	Grace Natalia, SP / Analis Pangan / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
20.	Muhammad Ahdiat, ST / PT. AM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
21.	Novika Sari Rahayu, ST / Perumda PALD Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Indra Permana / Perwakilan Bank Indonesia	Anggota		-	-
<b>Tim Penunjang dan Peninjau</b>					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
2.	Muhammad Nur, S.Pd, MA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB
3.	Firmansyah, S. Sos, M.Si / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB
4.	Helauniaty, S.Kom, MM / Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB
5.	Faried Rozali, S.Si.T / Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Viktor A. H., ST / PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)	Anggota		Rp200.000,00	OB
7.	Choirul Anwar / PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
8.	Dr. Muhammad Arsyad, ST, MT / Prodi Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat	Anggota		Rp200.000,00	OB
9.	Dr. Eng. Akbar Rahman, ST, MT / Prodi Arsitektur Universitas Lambung Mangkurat	Anggota		Rp200.000,00	OB
10.	Dr. Gazali Rahman, S.Sos, M.Si / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat	Anggota		Rp200.000,00	OB
11.	Drs. H. Muhammad Saleh, MP / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat	Anggota		Rp200.000,00	OB
12.	Muhammad Rifqi Hidayat, S.HI, M.SY / Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Emma Ruhaidani, ST, M.Sc / Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
14.	Diana Rahmawati, SH, MH / Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Anggota		Rp200.000,00	OB
15.	Dr. Titien Agustina, M.Si / Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
16.	Rijali Lufti, SE / Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB
17.	Nanda Febryan Pratamajaya, ST, MT / INTAKINDO Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	OB
18.	Salahuddin Bahri, SE / DPC HIPMIKINDO Kota Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Dendy Primanandi / Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Kesehatan dan Lingkungan	Anggota		Rp200.000,00	OB
20.	Drs. H. Hamdi / Tokoh Masyarakat	Anggota		Rp200.000,00	OB
21.	Hasan Zainuddin / Media Massa	Anggota		Rp200.000,00	OB
22.	Aida Rahmawaty, S.Sos / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
23.	Ariane Mariati, ST / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
24.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA